

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Rangka Antisipasi Krisis Global Pasca Pandemi COVID-19

Henriko Tobing^{*}, Nugroho Habibi¹, Iqbal Faza Ahmad¹, Muhyiddin¹

¹Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan

*Email Korespondensi: rikoberbagi@gmail.com

Abstrak

Dunia diprediksi menghadapi resesi atau pelambatan perputaran ekonomi yang berlangsung cukup lama serta tahunan akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang menurun selama dua kartal atau lebih pada tahun 2023. Berbagai kondisi seperti tingkat inflasi yang tinggi, fenomena dolar yang kuat, tingginya pengangguran, penurunan lapangan kerja, krisis pangan, dan perang menjadi alasan kuat bagi semua stakeholder di seluruh dunia untuk bersiap-siap menghadapi krisis pasca badai pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada roda perekonomian di Indonesia. Sebagai antisipasi, Indonesia khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan sejumlah langkah, yakni; meningkatkan *sense of crisis* (kepekaan terhadap krisis), melakukan penyelamatan untuk pemulihan berkelanjutan kepada masyarakat melalui bantuan langsung, menyediakan *learning center* (pusat edukasi) terhadap krisis ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Kebijakan Ketenagakerjaan, Antisipasi Krisis, Pasca Pandemi

DOI: 10.47198/naker.v17i3.182

Dikirim: 17-08-2022

Dipublikasikan: 01-12-2022

1. Pendahuluan

Dunia diprediksi menghadapi ancaman besar berupa krisis di berbagai sektor. Selain krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, dunia juga dihadapkan pada invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi. Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul “*Is a Global Recession Imminent?*” memprediksi terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang.

Perusahaan di berbagai negara terindikasi mengurangi produksi akibat menurunnya permintaan global, dolar Amerika Serikat (USD) terhadap hampir seluruh mata uang di dunia menguat dan krisis energi akibat perang Rusia dengan Ukraina.

Investor lantas lebih memilih menempatkan dananya pada mata uang dolar AS karena dianggap lebih aman. Fenomena ultra-dolar memberi sinyal yang sangat kuat bahwa ekonomi dunia sedang bergerak menuju resesi (Kontan, 27 September 2022).

Berdasarkan Berita Resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (2022), rentetan kondisi buruk tersebut mengakibatkan setidaknya 107 negara terdampak krisis sebagian di antaranya diperkirakan mengalami kebangkrutan. Sebanyak 553 juta jiwa penduduk di berbagai negara terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.

Indonesia disebut dapat bertahan menghadapi ancaman resesi global karena mampu mengendalikan pandemi COVID-19 dengan capaian vaksin sebanyak 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan, mengendalikan inflasi sebesar 4,9 persen yang jauh di bawah rata-rata inflasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Pergerakan perekonomian di Indonesia sejauh ini terus memperlihatkan tren positif dibandingkan dengan negara maju dan berkembang di dunia.

Tercatat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mampu surplus Rp106 triliun, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. Meskipun Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia mampu menghadapi berbagai krisis tersebut. Namun, masyarakat tetap harus berhati-hati dan mewaspadai kondisi krisis dunia tersebut.

Sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia sedikit banyak akan terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi jika terjadi resesi. Perlambatan tersebut berdampak juga pada aktivitas ekspor yang menyebabkan harga komoditas dan nilai tukar turun sekaligus terjadi penurunan permintaan konsumen. Ketika penjualan menurun, bisnis berhenti berkembang mengakibatkan efek domino terhadap pekerja. Perusahaan akan membatasi aktivitas industri mereka dan berhenti merekrut pekerja baru.

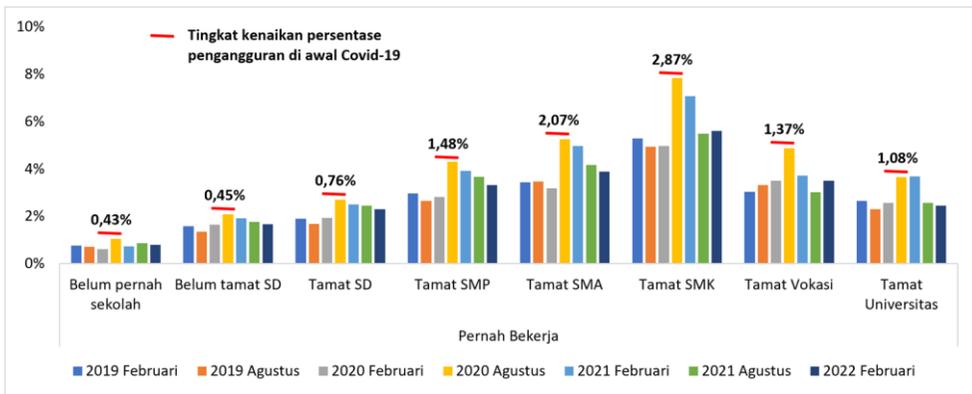
Bagi pekerja ancaman resesi, yakni meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, persaingan dalam pencarian kerja juga semakin meningkat karena banyak terjadi PHK. Tenaga kerja baru yang tersedia untuk dipekerjakan segera naik, tetapi lapangan kerja baru yang dibuka oleh pelaku usaha/pelaku bisnis menurun. Selama itu (resesi) pengangguran ataupun tenaga kerja baru menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Hasilnya adalah surplus tenaga kerja dari banyak jenis yang dapat bertahan.

Ancaman resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Tulisan ini merupakan hasil diskusi dengan pakar untuk memberikan rekomendasi kebijakan sekaligus melakukan langkah mitigasi, khususnya bagi ketenagakerjaan dalam menghadapi kondisi resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.

1.1. Pengaruh krisis terhadap ketenagakerjaan

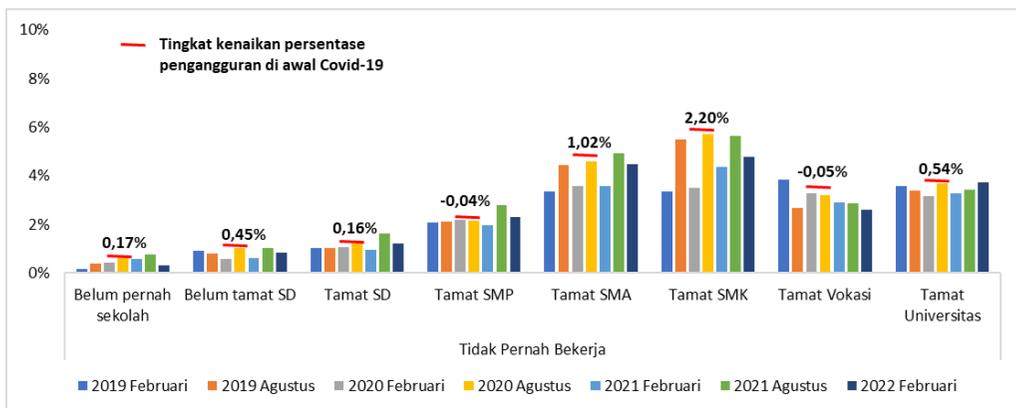
Studi terkait pengaruh krisis terhadap sektor ketenagakerjaan telah banyak dilakukan terutama pada saat krisis pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 telah menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan kelompok pengangguran dengan pengalaman bekerja sebesar 0,43-2,87 persen, sedangkan pada kelompok pengangguran yang tidak memiliki pengalaman bekerja, peningkatan terjadi sebesar 0,17-2,20 persen. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan menjadi penyumbang pengangguran tertinggi (BPS, 2022).

Gambar 1: Persentase pengangguran yang memiliki pengalaman kerja



Sumber: Sakernas BPS, diolah Pusbangjak Kemnaker, 2022

Gambar 2: Persentase pengangguran yang tidak memiliki pengalaman kerja



Sumber: Sakernas BPS, diolah Pusbangjak Kemnaker, 2022

Data tersebut di atas sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh Purnomo dkk. (2021) yang menyatakan bahwa terdapat banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi Covid 19. Adanya PHK ini dinilai merupakan salah satu efisiensi yang diberlakukan oleh perusahaan di tengah pandemi.

Martanti (2021) mengungkapkan bahwa pada 13 April 2020, sebanyak 1,2 juta tenaga kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemi tentunya beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang menafsirkan wabah Covid 19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam menjadi alasan *force majeure* untuk melakukan PHK (Romlah, 2020).

Gamil & Alhagar (2020) dalam studinya menjelaskan bahwa dampak paling menonjol dari Covid 19 adalah penangguhan proyek, dampak tenaga kerja dan kehilangan pekerjaan, kelebihan waktu, kelebihan biaya, dan implikasi keuangan. World Bank juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi akibat pandemi Covid 19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Pada tahun 2023-2027, perekonomian global diproyeksikan akan mengalami stagflasi.

Gambar 3: GDP growth & unemployment rate



Sumber: *Sumber: World Economic Outlook, 2022*

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah focus group discussion. Selain itu peneliti juga menggunakan data

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari artikel ilmiah, infografis, hasil survei, berita, dan surat kabar.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Manajemen protokol krisis ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS pada Mei 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 0,98 persen poin. Meningkatnya persentase penduduk usia 15 tahun yang dikategorikan sebagai angkatan kerja sejalan dengan peningkatan jumlah orang bekerja sebanyak 4,55 juta orang dibandingkan periode sebelumnya yang didominasi oleh pekerja di sektor pertanian. Selain itu, angka pengangguran juga menunjukkan penurunan pada periode yang sama. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 menurun menjadi 5,82% atau turun sebesar 0,15 persen poin.

Penurunan TPT pada awal tahun 2022 menunjukkan sinyal positif terhadap pemulihan ekonomi yang sempat terguncang dan bahkan mandek akibat pandemi COVID-19. Dilihat dari segi karakteristik kelompok orang yang bekerja pada periode Februari 2022, jumlah pekerja informal sebesar (59,97%) lebih besar dibandingkan pekerja formal (40,03%). Pekerja informal mengalami peningkatan sebanyak 0,35 persen poin, lebih besar dibandingkan dengan Februari 2020 (meningkat sebesar 3,33 persen poin).

Menurut data LPEM UI, (2022) yang mengelompokkan pekerja formal berdasarkan proporsi gender, tercatat bahwa pekerja informal perempuan antar tahun lebih banyak dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Kondisi ini tercermin dari data pada tahun 2021, yang mana juga terjadi pada tren 5 tahun terakhir. Pada Februari 2021, tercatat sebanyak 56,61% pekerja laki-laki merupakan pekerja informal dan 63,8% pekerja perempuan merupakan pekerja informal. Sedangkan jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, pekerja informal perempuan paling banyak merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan pekerja informal laki-laki paling banyak merupakan pekerja yang berusaha sendiri.

Menurut Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (2022), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada April 2022 meningkat cukup signifikan dari 87,7 pada bulan sebelumnya menjadi 95,9. Berdasarkan kategori pendidikan responden, kenaikan Indeks Ketersediaan Lapangan terjadi pada mayoritas kelompok pendidikan, terutama pada responden dengan pendidikan akademi dan pasca sarjana sedangkan berdasarkan kelompok usia, Indeks Ketersediaan Lapangan juga terpantau meningkat pada hampir seluruh kelompok usia responden, dengan peningkatan tertinggi pada kelompok responden berusia 20-30 tahun.

Gambar 4: Ketersediaan Lapangan Kerja pada April 2022 (Bank Indonesia)



Dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023, pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harus menskemakan kondisi terburuk yakni, kekacauan atau *chaos*. Antisipasi Krisis dan Prediksi Kekacauan (*chaos*) cenderung disiapkan dalam kerangka manajemen protokol krisis ekonomi-sosial dan keuangan (Kotler, 2009).

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dampak negatif digitalisasi, di mana masyarakat menerima terlalu banyak informasi yang tidak terverifikasi, *hoax*, dan sentimen-sentimen yang mengarah pada pengutuban opini, sehingga menyebabkan konflik dan segregasi sosial. Segregasi sosial terbentuk oleh lingkungan sosial yang dicirikan oleh penduduk akibat pola kerja dan usahanya mengenal pemisahan ke dalam kelompok, suku bangsa, ras atau satu etnik dan agama.

Pemerintah harus mampu menyelesaikan persoalan klasik di antaranya; kesenjangan antara ketersediaan peluang kerja dan jumlah angkatan kerja dengan membekali ketrampilan, upah kerja harus memadai, PHK dengan asas yang adil dan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melakukan pemetaan dan pemerataan terhadap persebaran angkatan kerja desa-kota, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan.

3.2. Macro-Economic outlook dan kaitannya dengan kondisi domestik

Menurut laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang *World Economic Outlook: Countering The Cost of Living Crisis* (2022), mengoreksi proyeksi inflasi global karena harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang masih tinggi. Menurut IMF, inflasi diproyeksikan mencapai 6,6% di negara maju serta 9,5% bagi negara berkembang pada 2022. Angka proyeksi inflasi terbaru tersebut naik masing-masing sebesar 0,9 dan 0,8 poin persentase dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya pada bulan April 2022.

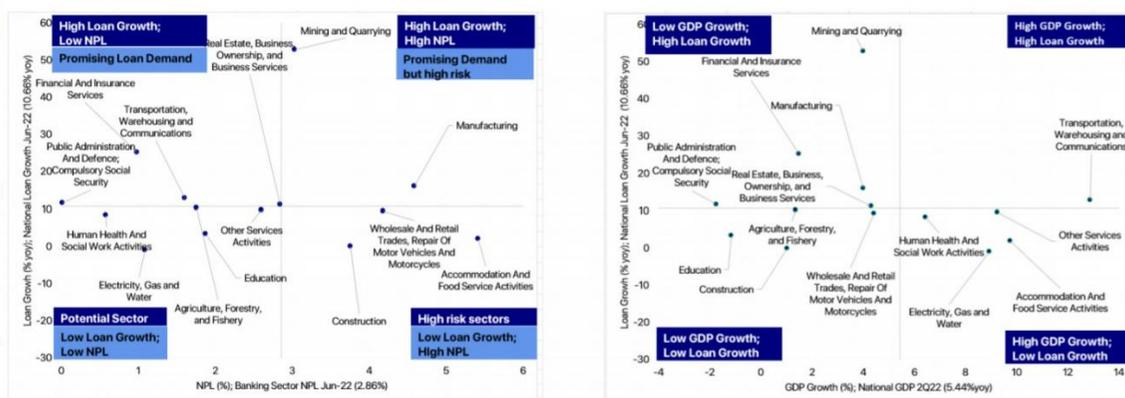
Faktor lain yang memberikan dampak besar terhadap ancaman resesi tahun 2023 yakni tingginya tingkat inflasi yang dipengaruhi oleh perang Rusia dengan Ukraina. Tekanan inflasi global terjadi seiring dengan tingginya harga beberapa komoditas pangan dan energi (minyak mentah, gas alam, dan batu bara) akibat terganggunya rantai

pasok yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. Inflasi di beberapa negara, khususnya di kawasan Eropa mencapai rekor kenaikan tertinggi sepanjang sejarah.

IMF melihat bahwa situasi 2023 merupakan profil inflasi pertumbuhan terlemah sejak 2001, kecuali masa pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global. Resesi ekonomi dipastikan akan menimpa negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Tidak hanya Amerika dan Eropa, Cina dan negara Asia lainnya juga sedang merasakan dampaknya.

Meskipun pergerakan ekonomi menunjukkan tren positif, sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tentu saja akan terdampak resesi ekonomi 2023. Perlambatan akan merambat melalui jalur ekspor, pelemahan harga komoditas, pelemahan nilai tukar. Kondisi ini akan membuat kondisi perekonomian domestik menjadi tidak pasti, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan melemah dengan catatan ekspor Indonesia masih didominasi komoditas dengan kontribusi sebesar 50%.

Gambar 5: Pertumbuhan Kredit Perbankan dan PDB Menurut Sektor



Melemahnya rupiah akan berdampak pada perusahaan dan masyarakat dikarenakan kenaikan harga bahan pokok sekaligus barang impor. Hutang perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam bentuk dolar akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi akibat menguatnya kurs dolar dan menyebabkan tingkat investasi di Indonesia semakin menurun. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi karena potensi gelombang PHK yang akan mengakibatkan krisis ketenagakerjaan.

4. Kesimpulan

Resesi ekonomi 2023 diprediksi akan menjadi kenyataan yang ditunjukkan dengan sejumlah indikasi seperti, pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina menguatnya dolar Amerika Serikat (AS). Meskipun kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif, tetapi pemerintah harus tetap menaruh kewaspadaan. Kementerian ketenagakerjaan harus membekali angkatan kerja dengan keterampilan agar lebih siap menghadapi persaingan global. Pemetaan wilayah berdasarkan padat penduduk, jenis pekerjaan, potensi masalah akibat krisis, melakukan pemetaan wilayah kurang penduduk tetapi memiliki keragaman suku bangsa dalam kaitan usaha dan pekerjaan,

pemetaan jenis usaha dan pekerjaan yang dapat tumbuh akibat tekanan krisis di kota dan pedesaan dan atau relasi kota-desa serta pengelolaan aliran migrasi tenaga kerja.

4.1. Rekomendasi

Untuk mengantisipasi resesi ekonomi global 2023 terhadap ketenagakerjaan Kementerian ketenagakerjaan harus menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, meningkatkan *sense of crisis*. Kepekaan para stake holder dan bahkan masyarakat terhadap kondisi-kondisi yang dapat mengarah terhadap terjadinya krisis serta membuat protokol antisipasinya.

Kedua, penyelamatan untuk pemulihan berkelanjutan. Protokol dalam menangani krisis, seperti pemberian bantuan dalam penyelamatan krisis, harus berkaitan dengan pemulihan ketenagakerjaan. Perluasan peluang usaha dan meningkatkan peluang kerja yang berbasis pengelolaan sumber daya lokal yang tidak terpisah dengan jaringan antar negara.

Kedua, penyelamatan untuk pemulihan berkelanjutan. Protokol dalam menangani krisis, seperti pemberian bantuan dalam penyelamatan krisis, harus berkaitan dengan pemulihan ketenagakerjaan. Perluasan peluang usaha dan meningkatkan peluang kerja yang berbasis pengelolaan sumber daya lokal yang tidak terpisah dengan jaringan antar negara.

Ketiga, *learning center* krisis ketenagakerjaan. Agar krisis tidak menjadi *chaos* perlu pemulihan sistem melalui pertukaran informasi yang dikenal sebagai *Komunikasi Krisis*. Proses penting agar tidak memperparah keadaan, serta masyarakat tetap memperoleh informasi yang benar, tepat dan dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi kepanikan.

Daftar Pustaka

- Gamil, Y., & Alhagar, A. (2020). The impact of pandemic crisis on the survival of construction industry: a case of COVID-19. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 11(4), 122-122.
- Guénette, J Damien. Dkk (2022), Is a Global Recession Imminent?, World Bank Group, EFI Policy Note 4
- Presidenri, (2022) Presiden Jokowi: Indonesia Mampu Hadapi Pandemi dan Krisis Global, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-indonesia-mampu-hadapi-pandemi-dan-krisis-global/> diakses 10 November 2022
- Kata Data, (2022) Berapa Jumlah Angkatan Kerja Indonesia 2022? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/berapa-jumlah-angkatan-kerja-indonesia-2022> diakses 10 November 2022.
- Survei Konsumen Bank Indonesia, (2022)
- BPS, 2022. Berita Resmi Statistik, Mei 2022.
- Kotler, P. and Caslione, J.A., 2009, *Chaostic The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulance*, New York: Amacom
- International Monetary Fund, (2022), *World Economic Outlook: Countering The Cost of*

Living Crisis, Washington, DC

- Martanti, D. M., Magdalena, F., Ariska, N. P. D., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. *Populasi*, 28(2), 52-69.
- Purnomo, A. S. D., Gitayuda, M. B. S., & Hartono, B. (2021). Pandemi Covid 19 Sebagai Force Majeure Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14(2), 21-35.
- Romlah, S. (2020). COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. *Adalah*, 4(1), 213-222